

**SEKRETARIAT KOMISI
INFORMASI PUSAT**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018

AUDITED

KATA PENGANTAR

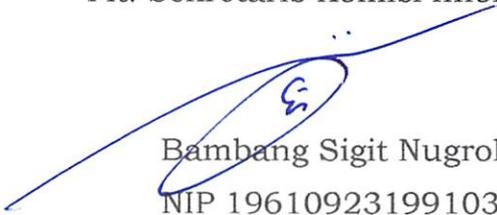
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2019
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat,



Bambang Sigit Nugroho
NIP 196109231991031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
WISMA BSG LT. 9
JL. ABDUL MUIS NO. 40 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 34830741, FAXIMILE 021 34531734

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2019
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat,


Bambang Sigit Nugroho
NIP 196109231991031001

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp71.320.228,- atau mencapai 0,0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp16.418.315.558,- atau mencapai 98,02 (98,02) persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.750.702.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp687.804.157,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp124.295.219,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp525.365.188,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp38.143.750,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.240.000,- dan Rp683.564.157,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.693.674.463,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp16.693.674.463,-. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp134.086.789,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp16.827.761.252,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.164.330.079,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.827.761.252,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.346.995.330,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp683.564.157,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	71.320.228	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN		-	71.320.228	#DIV/0!
BELANJA	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	3.558.798.000	3.369.234.186	94,67
Belanja Barang	B.4	12.937.034.000	12.797.308.873	98,92
Belanja Modal	B.5	254.870.000	251.772.499	98,78
Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA		16.750.702.000	16.418.315.558	98,02

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	478.780	1.545.228
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.3	123.816.439	143.005.555
Jumlah Aset Lancar		124.295.219	144.550.783
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	3.665.753.566	5.571.654.036
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	49.473.000	248.112.400
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(3.189.861.378)	(4.866.675.381)
Jumlah Aset Tetap		525.365.188	953.091.055
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	232.149.999	197.150.000
Aset Lain-Lain	C.8	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(194.006.249)	(130.218.750)
Jumlah Aset Lainnya		38.143.750	66.931.250
JUMLAH ASET		687.804.157	1.164.573.088
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	13.707.368	243.009
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.707.368	243.009
JUMLAH KEWAJIBAN		13.707.368	243.009
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	674.096.789	1.164.330.079
JUMLAH EKUITAS		674.096.789	1.164.330.079
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		687.804.157	1.164.573.088

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,382,219,765	3,037,524,576
Beban Persediaan	D.3	591,221,227	406,082,386
Beban Barang dan Jasa	D.4	7,688,237,709	6,743,191,251
Beban Pemeliharaan	D.5	402,159,752	224,899,447
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4,136,906,912	4,391,521,680
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	502,396,466	653,794,551
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		16,703,141,831	15,457,013,891
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,703,141,831)	(15,457,013,891)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		67,615,000	3,800,000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(205,889,400)	(2,240,000)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(151,702)	(1,016,056)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,339,313	3,856,154
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(134,086,789)	4,400,098
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16,837,228,620)	(15,452,613,793)
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16,837,228,620)	(15,452,613,793)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	1.164.330.079	1.304.939.462
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.837.228.620)	(15.452.613.793)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(2.643.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	(2.643.000)
JUMLAH		-	(2.643.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.346.995.330	15.314.647.410
EKUITAS AKHIR	E.5	674.096.789	1.164.330.079

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi publik di badan publik tingkat pusat. Organisasi dan tata kerja entitas diatur oleh Undang undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/037/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Entitas berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas dan fungsi dalam Memutuskan sengketa informasi publik serta memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian dan Lembaga yang berstatus Badan Publik dapat membuka informasi publiknya kepada Masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut guna mendukung pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Sekretariat Informasi Publik berkomitmen dengan visi “**mewujudkan Keterbukaan informasi publik di badan publik, agar tercapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga yang

berkelanjutan.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID).
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan basis

Akuntansi

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kominfo yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

Panjang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Sekretariat Komisi Informasi Pusat* melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 6 kali. Revisi yang pertama di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran karena adanya pergeseran nilai antar output. Revisi yang kedua sampai keenam merupakan revisi di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena pemutakhiran data POK. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.558.798.000	3.558.798.000
Belanja Barang	12.937.034.000	12.937.034.000
Belanja Modal	254.870.000	254.870.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	16.750.702.000	16.750.702.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp71.320.228*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.320.228 atau mencapai 0 persen karena tidak ada anggaran pendapatan. Pendapatan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri dari Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan	-	67.615.000	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	3.705.228	#DIV/0!
Jumlah	-	71.320.228	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan lain-lain TA 2018 mengalami penurunan 45,39 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan

Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan		-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	3.705.228	6.784.330	-45,39
Jumlah	3.705.228	6.784.330	-45,39

*Realisasi
Belanja Negara
Rp16.418.315.5
58*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp16.418.315.558,- atau 98,02% dari anggaran belanja sebesar Rp16.750.702.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,558,798,000	3,369,234,186	94.67
Belanja Barang	12,937,034,000	12,797,308,873	98.92
Belanja Modal	254,870,000	251,772,499	98.78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	16,750,702,000	16,418,315,558	98.02
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	16,750,702,000	16,418,315,558	98.02

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar 7,16% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat dukungan penuh dari pimpinan dalam mengoptimalkan program atau kegiatan Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Rencana Kerja sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,369,234,186	3,192,133,118	5.55
Belanja Barang	12,797,308,873	11,834,572,597	8.13
Belanja Modal	251,772,499	294,726,025	(14.57)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16,418,315,558	15,321,431,740	7.16

*Belanja
Pegawai
Rp336.234.186*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.369.234.186,- dan Rp3.192.133.118,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar 5,55 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan karena kekosongan jabatan struktural eselon 2 dan eselon 4 pada tahun 2017 telah diisi pada tahun 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.099.069.791	1.080.226.221	1,74
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	1.123.600.000	1.142.490.000	(1,65)
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & B Transito	1.146.564.478	1.036.950.122	10,57
Jumlah Belanja Kotor	3.369.234.269	3.259.666.343	3,36
Pengembalian Belanja Pegawai	(83)	(67.533.225)	(100,00)
Jumlah Belanja	3.369.234.186	3.192.133.118	5,55

*Belanja
Barang
Rp12.797.308.8*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.797.308.873,- dan

Rp11.834.572.597,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 8,13 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini terjadi karena program kerja yang direncanakan pada TA 2018 dapat dilaksanakan seluruhnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.516.833.428	2.420.114.770	4,00
Belanja Barang Non Operasional	1.364.167.293	1.234.948.750	10,46
Belanja Jasa	3.807.236.988	3.092.602.150	23,11
Belanja Pemeliharaan	400.308.252	234.105.447	70,99
Belanja Barang Persediaan	571.856.000	461.279.800	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.136.906.912	4.088.218.612	1,19
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	303.303.068	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	12.797.308.873	11.834.572.597	8,13
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	12.797.308.873	11.834.572.597	8,13

Belanja Modal
Rp 251.772.499

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp251.772.499,- dan Rp294.726.025,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami Penurunan sebesar 14,57% dibandingkan TA 2017 hal ini terjadi karena adanya penurunan pagu di TA 2018 untuk belanja modal. Namun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 98,78 persen. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan karena belanja modal berupa buku perpustakaan belum terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.272.500	247.226.025	(14,14)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	39.499.999	47.500.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	251.772.499	294.726.025	-14,57
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	251.772.499	294.726.025	-14,57

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rekening 032901002931306	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp478.780*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp478.780,- dan Rp1.545.228,-. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pot. Kehadiran Tunkin bln Des 2017	478.780	1.545.228
Pembayaran Internet	-	-
	-	-
Jumlah	478.780	1.545.228

Persediaan

Rp123.816.439

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 123.816.439,- dan Rp143.005.555,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	123.288.439	142.747.555
Barang untuk Pemeliharaan	528.000	258.000
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	123.816.439	143.005.555

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan

Mesin

Rp3,665,753,566

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp3.665.753.566,- dan Rp5.571.654.036,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5,571,654,036
Mutasi tambah:	
Penggunaan kembali	1,346,200,000
Pembelian	212,272,500
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	3,464,372,970
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	3,665,753,566
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(3,189,861,378)

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Penggunaan kembali 6 unit Sedan senilai Rp1.155.000.000,-
- b. Penggunaan kembali 1 unit Mini Bus (Penumpang dibawah 14 Orang) senilai Rp 191.200.000,-
- c. Pembelian 1 bh Kursi Metal senilai Rp 7.749.500,-
- d. Pembelian 8 bh Sice senilai Rp 129.800.000,-
- e. Pembelian 3 bh Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) senilai Rp 19.500.000,-
- f. Pembelian 7 bh Televisi senilai Rp 49.973.000,-
- g. Pembelian 1 bh Refrigerator/Freezer senilai Rp 5.250.000,-

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan 13 unit Sedan senilai Rp 2.502.500.000,- 2 unit Mini Bus (Penumpang dibawah 14 orang) senilai Rp 382.400.000,- 2 buah Filing Cabinet Besi senilai Rp 3.127.500,- 4 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp 28.189.450,- 63 buah Kursi Metal senilai Rp 87.922.720,- 8 buah Sice senilai Rp 46.278.200,- 6 buah Meja Rapat senilai Rp 19.318.100,- 3 buah Partisi senilai Rp 54.783.300,- 2 buah A.C. Window senilai Rp 33.500.000,- 1 buah Televisi senilai

Rp 37.930.000,- 12 buah Karpetsenilai Rp 86.240.000,- 12 buah Vertikal Blind Rp27.781.200,- 2 buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 3.535.000,- 2 buah Mini Komputer senilai Rp 20.724.000,- 9 buah Note Book senilai Rp 125.621.500,- dan 3 buah Printer senilai Rp 4.522.000,-. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp49.473.000

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp49.473.000,- dan Rp248.112.400,-. Aset tetap tersebut berupa monografi dan buku lainnya. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	248,112,400	Belum diedit
Mutasi tambah:		
-	4,500,000	
Mutasi kurang:		
-	203,139,400	
Saldo per 31 Desember 2018	49,473,000	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0	
Nilai Buku per 31 Desember 2018	49,473,000	

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya merupakan penambahan 3 buah Monografi senilai Rp 4.500.000,-. Mutasi kurang merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi senilai Rp 85.914.400,- dan 3 unit Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi senilai Rp 117.225.000,-. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.189.861.378*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp3.189.861.378,- dan Rp4.866.675.381,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.665.753.566	3.189.861.378	475.892.188
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	49.473.000	0	49.473.000
Akumulasi Penyusutan		3.715.226.566	3.189.861.378	525.365.188

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp232.149.999*

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp232.149.999,- dan Rp197.150.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	197.150.000
Mutasi tambah:	34.999.999
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	232.149.999
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	(194.006.249)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	38.143.750

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2018

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	232.149.999
	0
Jumlah	232.149.999

Aset Lain-Lain
Rp0

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	-
Mutasi tambah:	
- Penghentian penggunaan	2,118,172,970
- Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	85,914,400
- Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	117,225,000
Mutasi kurang:	
- penghapusan BMN	(2,321,312,370)
Saldo per 31 Desember 2018	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penghentian Penggunaan atas 7 buah Sedan senilai

Rp 1.347.500.000 1 buah Mini Bus senilai Rp 191.200.000,- 2 buah Filing Cabinet Besi senilai Rp 3.127.500,- 4 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp 28.189.450,- 65 buah Kursi Metal senilai Rp 87.922.720,- 8 buah Sice senilai Rp 46.278.200,- 6 buah Meja Rapat senilai Rp 19.318.100,- 3 buah Partisi senilai Rp 54.783.300,- 2 buah A.C. Window senilai Rp 33.500.000,- 1 buah Televisi senilai Rp 37.930.000,- 12 buah Karpas senilai Rp 86.240.000,- 12 buah Vertikal Blind senilai Rp 27.781.200,- 2 buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 3.535.000,- 2 buah Mini Komputer senilai Rp 20.724.000,- 9 buah Note Book senilai Rp 125.621.500,- dan 3 Printer senilai Rp 4.522.000,-

- Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi senilai Rp85.914.400,-
- Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi senilai Rp117.225.000,-
- Penghapusan BMN senilai Rp 2.231.312.370,-

! Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp194.006.249*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp194.006.249,- dan Rp130.218.750,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	232,149,999	194,006,249	38,143,750
Jumlah	232,149,999	194,006,249	38,143,750
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	232,149,999	194,006,249	38,143,750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp13.707.368.

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 13.707.368,- dan Rp243.009,-. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah uang makan, tunjangan, dan gaji susulan tambahan CPNS, serta uang makan PNS Bulan Desember yang belum dibayarkan, dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Kekurangan Belanja Pegawai Bulan Desember 2018	4,240,000	Uang Makan Pegawai Komisi Informasi Pusat Bulan Desember belum dibayarkan karena uang persediaan sudah tidak ada
Uang makan, tunjangan, dan gaji susulan tambahan CPNS	9,467,368	SPMT CPNS Bulan Desember sehingga belum dianggarkan sebelumnya
	-	
Total	13,707,368	

Ekuitas

Rp674.096.789

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp674.096.789,- dan Rp1.164.330.079,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP

Rp 0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat Pendapatan Jasa maupun Pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional Tahun 2018 maupun Tahun 2016.

*Beban
Pegawai
Rp3.382.219.
765*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.382.219.765,- dan Rp3.037.524.576,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai sebesar 11 % disebabkan karena jabatan yang pada Tahun 2017 masih kosong telah terisi pada Tahun 2018 serta adanya penambahan CPNS pada Bulan Desember 2018 sejumlah 2 orang.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	787.916.930	788.176.496	(0,03)
Beban Tunjangan-tunjangan	319.932.337	292.292.734	9,46
Beban Honorarium dan Vakasi	1.123.600.000	1.142.490.000	(1,65)
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan)	1.150.770.498	814.565.346	41,27
Jumlah	3.382.219.765	3.037.524.576	11

*Beban
Persediaan
Rp591.221.2
27*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp591.221.227 dan Rp406.082.386,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	591.221.227	406.082.386	45,59
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	591.221.227	406.082.386	45,59

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp7.688.237.
709*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.688.237.709,- dan Rp6.743.191.251,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	2.348.094.428	2.201.381.770	6,66
Beban Jasa Pos dan Giro	15.479.000	5.623.000	175,28
Beban Honor	328.674.200	504.670.000	(34,87)
Beban Barang	804.661.685	476.349.800	68,92
Beban Bahan	384.091.408	467.038.950	(17,76)
Beban Langganan dan daya	88.544.188	121.830.761	(27,32)
Beban Sewa	3.405.932.800	2.463.096.970	38,28
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa Profesi	312.760.000	403.250.000	(22,44)
Beban Jasa Lainnya	0	99.950.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-
Jumlah	7.688.237.709	6.743.191.251	14,01

*Beban
Pemeliharaan
Rp402.159.7
52*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp402.159.752,- dan Rp224.899.447,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	402.159.752	366.924.823	9,60
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	402.159.752	366.924.823	9,60

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp4.136.906.
912*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 4.136.906.912,- dan Rp4.391.521.680,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.242.656.923	1.468.409.346	-15,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	314.275.000	140.910.000	123,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	429.353.905	231.920.000	85,13
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.150.621.084	2.246.979.266	-4,29
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri		0	#DIV/0!
Jumlah	4.136.906.912	4.088.218.612	1,19

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp502.396.4
66*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp502.396.466,- dan Rp653.794.551,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	323,612,724	523,698,926	(38.21)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	114,996,243	96,995,625	18.56
Jumlah Penyusutan	438,608,967	620,694,551	(29.34)
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	63,787,499	33,100,000	92.71
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	63,787,499	33,100,000	92.71
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	502,396,466	653,794,551	(23.16)

Surplus/Defisit
t dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp134.086.78
9

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	67,615,000	3,800,000	16.79
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(205,889,400)	(2,240,000)	90.91
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	4,339,313	3,856,154	0.13
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(151,702)	(1,016,056)	(0.85)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(134,086,789)	4,400,098	(3147.36)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar
Biasa Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp1.164.330.079

9

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.164.330.079 dan Rp1.304.939.462,-.

Defisit LO

Rp16.837.228.620

20

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp16.837.228.620,- dan Rp15.452.613.793,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap non Revaluasi	-
Aset lainnya non Revaluasi	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp2.643.000,-. Rincian Koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi
Antar Entitas
Rp16.346.995.330*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.346.995.330 dan Rp15.314.647.410,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(71.320.228)
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.418.315.558
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	16.346.995.330

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp71.320.228,-) sedangkan DKEL sebesar Rp16.418.315.558,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 .

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0-. dari yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas

E.5 Ekuitas Akhir

Akhir

Rp674.096.789

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp674.096.789,- dan Rp1.164.330.079,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Sehubungan Telah Memasuki Masa Pensiun Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat maka diputuskan perlu dilakukan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 819 TAHUN 2018 tentang penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 Oktober 2018 telah dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran ,

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Hendra Purnama, M.Si

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Sukarni Lestari, S.SOS, M.Si

- Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : 1978/SJ/KP.01.06/10/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 01 November 2018 telah dilakukan penggantian Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

Semula :

Sekretaris K I P : Drs. Hendra Purnama, M.Si

Menjadi :

Plt. Sekretaris K I P : Drs. Bambang Sigit Nugroho, M.Si

Sehubungan telah menasuki masa Pensiun Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KOMISI INFORMASI PUSAT, maka diputuskan perlu dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 44 TAHUN 2018 tentang penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 01 November 2018 telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen,

Semula :

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Hendra Purnama, M.Si

Menjadi :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nunik Purwanti, S.Kom, M.Pd

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 41 TAHUN 2018 tentang perubahan Penunjukan Pejabat Penandatangan SPM Sekretariat Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 12 September 2018 telah dilakukan penggantian Pejabat Penandatangan SPM,

Semula :

Pejabat Penandatangan SPM : Muryani

Menjadi :

Pejabat Penandatangan SPM : Indah Puji Rahayu, S.Pd

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 1
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
04	EKONOMI								
09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika								
3020	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat								
001	Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	69,863,000	70,348,000	7,449,600	65,398,858	0	65,398,858	92.96	4,949,142
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	79,550,000	67,750,000	8,700,000	67,372,000	0	67,372,000	99.44	378,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,250,000	12,705,000	926,000	4,747,850	0	4,747,850	37.37	7,957,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	169,663,000	150,803,000	17,075,600	137,518,708	0	137,518,708	91.19	13,284,292
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,283,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,283,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	27,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	67,200,000	66,700,000	0	66,650,000	(2,890,000)	63,760,000	95.59	2,940,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	94,200,000	69,700,000	0	69,650,000	(2,890,000)	66,760,000	99.93	2,940,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,940,000	11,940,000	0	11,820,000	0	11,820,000	98.99	120,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**
JENIS SATUAN KERJA : KP **KANTOR PUSAT**

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 2
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,100,000	42,750,000	0	42,480,000	0	42,480,000	99.37	270,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	83,550,000	44,950,000	10,750,000	36,000,000	0	36,000,000	80.09	8,950,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	635,367,000	706,960,000	62,780,000	703,901,200	0	703,901,200	99.57	3,058,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	760,957,000	806,600,000	73,530,000	794,201,200	0	794,201,200	98.46	12,398,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,027,103,000	1,027,103,000	90,605,600	1,001,369,908	(2,890,000)	998,479,908	97.49	28,623,092
53	BELANJA MODAL								
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	42,500,000	42,500,000	34,999,999	39,499,999	0	39,499,999	92.94	3,000,001
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	42,500,000	42,500,000	34,999,999	39,499,999	0	39,499,999	92.94	3,000,001
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	42,500,000	42,500,000	34,999,999	39,499,999	0	39,499,999	92.94	3,000,001
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.001	1,069,603,000	1,069,603,000	125,605,599	1,040,869,907	(2,890,000)	1,037,979,907	97.31	31,623,093
002	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	50,505,000	85,005,000	14,647,000	83,388,000	0	83,388,000	98.10	1,617,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,900,000	12,500,000	0	10,000,000	0	10,000,000	80.00	2,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	85,900,000	43,368,000	490,000	42,477,500	0	42,477,500	97.95	890,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	148,305,000	140,873,000	15,137,000	135,865,500	0	135,865,500	96.45	5,007,500
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	0	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	203,600,000	124,800,000	1,000,000	123,700,000	0	123,700,000	99.12	1,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	203,600,000	124,800,000	1,000,000	123,700,000	0	123,700,000	99.12	1,100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	363,880,000	222,380,000	0	221,826,500	0	221,826,500	99.75	553,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**
JENIS SATUAN KERJA : KP **KANTOR PUSAT**

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 3
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,400,000	29,400,000	0	29,390,000	0	29,390,000	99.97	10,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167,400,000	94,480,000	0	94,120,000	0	94,120,000	99.62	360,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	300,207,000	443,419,000	31,860,000	436,291,595	0	436,291,595	98.39	7,127,405
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	860,887,000	789,679,000	31,860,000	781,628,095	0	781,628,095	98.98	8,050,905
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,212,792,000	1,055,352,000	47,997,000	1,041,193,595	0	1,041,193,595	98.66	14,158,405
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.002	1,212,792,000	1,055,352,000	47,997,000	1,041,193,595	0	1,041,193,595	98.66	14,158,405
003	Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	2,000,000	0	1,876,000	0	1,876,000	93.80	124,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,000,000	2,000,000	0	1,876,000	0	1,876,000	93.80	124,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	115,368,000	159,594,000	2,495,000	155,373,050	0	155,373,050	97.36	4,220,950
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	86,200,000	66,700,000	9,450,000	64,992,200	0	64,992,200	97.44	1,707,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,250,000	8,750,000	0	2,640,000	0	2,640,000	30.17	6,110,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	223,818,000	235,044,000	11,945,000	223,005,250	0	223,005,250	94.88	12,038,750
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,615,000	6,615,000	0	1,895,000	0	1,895,000	28.65	4,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6,615,000	6,615,000	0	1,895,000	0	1,895,000	28.65	4,720,000
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	27,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	51,900,000	55,900,000	0	53,900,000	0	53,900,000	96.42	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	78,900,000	75,900,000	0	73,900,000	0	73,900,000	97.36	2,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**
JENIS SATUAN KERJA : KP **KANTOR PUSAT**

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 4
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	182,760,000	62,160,000	0	61,857,650	0	61,857,650	99.51	302,350
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	375,015,000	141,270,000	0	140,300,000	0	140,300,000	99.31	970,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	653,775,000	819,694,000	0	817,306,075	0	817,306,075	99.71	2,387,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,211,550,000	1,023,124,000	0	1,019,463,725	0	1,019,463,725	99.64	3,660,275
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,522,883,000	1,342,683,000	11,945,000	1,320,139,975	0	1,320,139,975	98.32	22,543,025
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.003	1,522,883,000	1,342,683,000	11,945,000	1,320,139,975	0	1,320,139,975	98.32	22,543,025
004	Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0.00	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0.00	2,000,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	93,590,000	82,036,000	11,709,500	78,938,500	0	78,938,500	96.22	3,097,500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,200,000	19,050,000	0	14,550,000	0	14,550,000	76.38	4,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	412,800,000	400,050,000	0	398,099,850	0	398,099,850	99.51	1,950,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	533,590,000	501,136,000	11,709,500	491,588,350	0	491,588,350	98.09	9,547,650
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	14,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	80,800,000	77,300,000	6,400,000	71,400,000	0	71,400,000	92.37	5,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	95,300,000	77,300,000	6,400,000	71,400,000	0	71,400,000	92.37	5,900,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,620,000	4,620,000	0	4,545,000	0	4,545,000	98.38	75,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**
JENIS SATUAN KERJA : KP **KANTOR PUSAT**

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 5
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,900,000	22,410,000	9,170,000	20,560,000	0	20,560,000	91.74	1,850,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167,000,000	144,900,000	0	143,723,905	0	143,723,905	99.19	1,176,095
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230,821,000	194,265,000	28,812,000	193,122,214	0	193,122,214	99.41	1,142,786
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	444,341,000	366,195,000	37,982,000	361,951,119	0	361,951,119	98.84	4,243,881
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,075,231,000	946,631,000	56,091,500	924,939,469	0	924,939,469	97.71	21,691,531
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.004	1,075,231,000	946,631,000	56,091,500	924,939,469	0	924,939,469	97.71	21,691,531
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3020	4,880,509,000	4,414,269,000	241,639,099	4,327,142,946	(2,890,000)	4,324,252,946	98.03	90,016,054
3020	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat								
951	Layanan Internal (Overhead)								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212,370,000	212,370,000	0	212,272,500	0	212,272,500	99.95	97,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	212,370,000	212,370,000	0	212,272,500	0	212,272,500	99.95	97,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	212,370,000	212,370,000	0	212,272,500	0	212,272,500	99.95	97,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.951	212,370,000	212,370,000	0	212,272,500	0	212,272,500	99.95	97,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3020	212,370,000	212,370,000	0	212,272,500	0	212,272,500	99.95	97,500
3020	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	950,652,000	825,652,000	43,590,700	784,600,900	0	784,600,900	95.03	41,051,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	20,000	625	11,894	(83)	11,811	59.06	8,189

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**
JENIS SATUAN KERJA : KP **KANTOR PUSAT**

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 7
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521211	Belanja Bahan	1,000,000	1,000,000	993,000	993,000	0	993,000	99.30	7,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	19,400,000	13,800,000	18,500,000	0	18,500,000	95.36	900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,372,000	358,940,000	7,816,000	356,696,485	0	356,696,485	99.37	2,243,515
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	32,372,000	379,340,000	22,609,000	376,189,485	0	376,189,485	99.17	3,150,515
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	246,000,000	571,500,000	15,294,000	569,961,000	0	569,961,000	99.73	1,539,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	246,000,000	571,500,000	15,294,000	569,961,000	0	569,961,000	99.73	1,539,000
5221	Belanja Jasa								
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	18,000,000	223,975	16,897,085	0	16,897,085	93.87	1,102,915
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	82,000,000	82,000,000	5,286,000	71,647,103	0	71,647,103	87.37	10,352,897
522141	Belanja Sewa	3,634,180,000	3,385,412,000	19,440,200	3,382,932,800	0	3,382,932,800	99.93	2,479,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,788,180,000	3,485,412,000	24,950,175	3,471,476,988	0	3,471,476,988	99.60	13,935,012
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	363,150,000	409,650,000	34,176,000	396,208,252	0	396,208,252	96.72	13,441,748
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	10,000,000	5,000,000	0	4,100,000	0	4,100,000	82.00	900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	373,150,000	414,650,000	34,176,000	400,308,252	0	400,308,252	96.54	14,341,748
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	406,313,000	942,715,000	120,762,400	942,607,773	0	942,607,773	99.99	107,227
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,250,000	225,100,000	5,060,000	222,790,000	(945,000)	221,845,000	98.55	3,255,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	15,368,000	4,060,000	15,210,000	0	15,210,000	98.97	158,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	443,563,000	1,183,183,000	129,882,400	1,180,607,773	(945,000)	1,179,662,773	99.78	3,520,227
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	375,000,000	500,000	0	0	0	0	0.00	500,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 29 Januari 2019
Halaman : 8
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	375,000,000	500,000	0	0	0	0	0.00	500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,099,025,000	8,565,265,000	611,343,601	8,513,500,926	(945,000)	8,512,555,926	99.40	52,709,074
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3020.994	11,657,823,000	12,124,063,000	965,501,022	11,882,735,195	(945,083)	11,881,790,112	98.01	242,272,888
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3020	11,657,823,000	12,124,063,000	965,501,022	11,882,735,195	(945,083)	11,881,790,112	98.01	242,272,888
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.09.01	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.09	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 04	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	16,750,702,000	16,750,702,000	1,207,140,121	16,422,150,641	(3,835,083)	16,418,315,558	98.04	332,386,442

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
UNIT ORGANISASI : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

JENIS KEWENANGAN : KP **KANTOR PUSAT**

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	3,382,219,765
Beban Persediaan	591,221,227
Beban Barang dan Jasa	7,688,237,709
Beban Pemeliharaan	402,159,752
Beban Perjalanan Dinas	4,136,906,912
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	502,396,466
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	16,703,141,831
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16,703,141,831)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
UNIT ORGANISASI : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROPINSI : 0199 **INSTANSI PUSAT**
SATUAN KERJA : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

JENIS KEWENANGAN : KP **KANTOR PUSAT**

URAIAN	JUMLAH
1	2
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	67,615,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	205,889,400
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(138,274,400)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,339,313
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	151,702
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,187,611
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(134,086,789)
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(16,837,228,620)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	1,164,330,079
SURPLUS/DEFISIT - LO	(16,837,228,620)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,346,995,330
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(490,233,290)
EKUITAS AKHIR	674,096,789

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB
 Tanggal : 11/02/19
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	478,780
Persediaan	123,816,439
JUMLAH ASET LANCAR	124,295,219
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	3,665,753,566
Aset Tetap Lainnya	49,473,000
Akumulasi Penyusutan	(3,189,861,378)
JUMLAH ASET TETAP	525,365,188
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	232,149,999
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(194,006,249)
JUMLAH ASET LAINNYA	38,143,750
JUMLAH ASET	687,804,157
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	13,707,368
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13,707,368
JUMLAH KEWAJIBAN	13,707,368
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	674,096,789
JUMLAH EKUITAS	674,096,789
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	687,804,157